

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi telah melahirkan *stereotype* di kalangan masyarakat. *Stereotype* yang muncul berkaitan dengan muatan ideologis di balik Pendidikan Kewiraan. Selama ini, Pendidikan Kewiraan merupakan media strategis dari regime politik Orde Baru untuk melakukan proses doktrinisasi kepada masyarakat lewat penanaman nilai yang lebih berorientasi pada pemantapan status quo yang kental dengan nuansa militeristik, baik dari segi materi maupun teknis pelaksanaannya. Bahkan peran negara sebagai penguasa dianggap terlalu kuat sehingga kurang dapat menumbuhkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang tepat dari mahasiswa khususnya. Selama ini ada rasa ketakutan dari penguasa apabila mahasiswa diberi pendidikan politik dan demokrasi, maka akan berdampak negatif. Hal ini diperkuat dengan pendapat para pengamat bahwa "isi Pendidikan Kewiraan cenderung diberikan dengan pendekatan militer yang indoktrinatif, belum mendidik warga negara menjadi warga negara yang mandiri, kreatif dan mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut tentu ironis dengan karakteristik pendidikan tinggi yang ingin membangun generasi yang dewasa secara mental dan akademis, luas pandangan dan kritis dengan dunianya sendiri dalam rangka membangun masa depan yang lebih bermutu. Mahasiswa dalam Pendidikan Kewiraan di dudukkan hanya sebagai obyek pendidikan, agar mewarisi nilai-nilai lama yang telah ketinggalan jaman, serta dimobilisasi untuk mendukung rezim bahkan untuk siap bela negara secara fisik.

Perubahan tentang judul mata kuliah maupun materi telah dilakukan setelah adanya reformasi. Pendidikan Kewiraan telah diganti dengan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan materi PKN telah ditambah dengan materi demokrasi, HAM, Otonomi daerah, dan lain-lain. Namun dari pendapat para ahli dan pengajar, materi belum berubah secara signifikan sehingga bila mengacu kepada materi dan metode serta dosen yang sama dimungkinkan tujuan pendidikan kewarganegaraan belum akan mampu membentuk masyarakat sipil yang baik. Oleh karena itu diperlukan penanaman nilai CE yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara serta dapat membentuk masyarakat sipil yang kuat.

B. EVALUASI

Selama ini proses penanaman nilai-nilai CE di perguruan tinggi dilakukan secara bermacam-macam. Pemerintah yang telah memberlakukan SK baru berkaitan pendidikan nilai-nilai kewarganegaraan telah merubah Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun tidak semua perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah mengganti Pendidikan Kewiraan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Masih ada perguruan tinggi yang masih tetap memberikan Pendidikan Kewiraan, atau sudah mengganti isi Pendidikan Kewiraan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sementara nama mata kuliah masih tetap Pendidikan Kewiraan. Dari investigasi yang dilakukan di berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diteliti ditemukan bahwa:

1. Semua dosen yang memangku matakuliah Pendidikan Kewiraan adalah mereka yang sudah mengikuti pelatihan di Lemhannas dan juga alumni S2 (Tannas). Selama ini pelaksanaan matakuliah Pendidikan Kewiraan bersifat paket dari Lemhanas. Syarat menjadi dosen Kewiraan adalah mereka yang telah mengikuti kursus dosen Kewiraan (SUSCADOSWIR) yang diadakan oleh Lemhanas; juga penataran dan lokakarya

(PENTALOKA) Dosen Kewiraan. Dosen-dosen Kewiraan yang ada sebagian besar dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri yang diminta mengajar di Perguruan Tinggi Swasta, dan sebagian kecil dikirim oleh ABRI (ditunjuk oleh PANGDAM setempat).

2. Materi yang diajarkan merupakan standar dari Lemhanas, yang masih cenderung bersifat militeristis. Materi dalam matakuliah yang sesuai standar meliputi: pengertian kewiraan, konsep negara kepulauan, konsep kekuatan, konsep wawasan nusantara, ketahanan nasional, pendekatan komprehensif integral dalam menanggapi masalah ketahanan nasional, konsep bela negara dan dwi fungsi ABRI, sistem hankamrata, maritim nasional, serta pembinaan teritorial. Referensi yang digunakan: (1) Lemhanas-Dirjen Dikti Depdikbud RI 1984: Kewiraan untuk Mahasiswa (Gramedia, Jakarta), (2) Lemhanas 1978: Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Lemhanas, Jakarta), (3) Lemhanas 1972: Naskah Wawasan Nusantara.
3. Sementara setelah Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sesuai SK Menteri Pendidikan No 167/2000, muatannya ditambah dengan Kewarganegaraan, Kebijakan pemerintah, HAM, OTDA, dan lingkungan. Materi ini dikembangkan oleh masing-masing dosen dengan cara menyesuaikan dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara. Materi yang bersifat militeristis dan melegitimasi status quo suatu rezim tidak lagi ditekankan dalam pengajaran Pendidikan Kewiraan/PKN. Dosen berinovasi dengan cara melakukan improvisasi dan mengelaborasi pemahaman mengenai konsep-konsep WANUS dan TANAS berdasarkan literatur tambahan dari berbagai sumber. WANUS dipahami secara lebih luas dalam pengertian eksistensi bangsa dan negara di persimpangan dunia dan di tengah-tengah arus globalisasi yang gencar melanda, yang salah satunya

menyebabkan berbagai budaya asing menyerbu Indonesia. Juga dijelaskan oleh dosen kepada mahasiswa mengenai masyarakat kita yang sangat pluralistis dan heterogen, sehingga diharapkan tumbuh jiwa dan kesadaran mahasiswa sebagai generasi muda untuk saling menghargai, tidak egois serta tidak hedonis. Patriotisme penting dalam arti cinta negara, bangsa, berkepribadian Indonesia, tidak mudah terkena budaya asing yang negatif.

4. Di perguruan tinggi yang dijadikan sampel penelitian, tidak ada keluhan dari mahasiswa mengenai pelaksanaan matakuliah Pendidikan Kewiraan/PKN. Namun demikian beberapa dosen Kewiraan mengatakan bahwa materi mata kuliah itu pernah dikritik oleh para mahasiswa. Mereka mengkritik bahwa mata kuliah itu khususnya Pendidikan Kewiraan syarat dengan warna militerismenya. Oleh karena itu pada era sekarang beberapa dosen itu kemudian mencoba melakukan pengembangan sendiri. Materi yang berbau militeristik dikurangi dan materi yang mengedepankan demokrasi dan hak-hak politik warga negara ditambah porsinya. Referensi yang digunakan adalah: Buku kewiraan untuk mahasiswa, Pendidikan Kewiraan, *civic education* (HAM dan Masyarakat Madani), Diktat sendiri, Buku Pendidikan Kewarganegaraan dari Lemhanas, Pendidikan Kewarganegaraan dari UGM, dan makalah pelatihan dosen Kewiraan.
5. Metode yang digunakan selama ini merupakan terapan dari pembinaan para Widyaswara di Lemhanas, berupa; ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, diskusi paripurna, pemberian tugas, dan pendalaman materi. Metode pengajarannya terlalu banyak ceramah dan hanya sedikit tanya jawab sehingga mahasiswa kurang menaruh respek pada mata kuliah ini. Ditambah lagi bahwa dalam pelaksanaan mata kuliah ini tidak ada kontrol/monitoring baik dari pimpinan Fakultas (PD I)

maupun dari kopertis, sehingga terkesan mata kuliah ini berjalan terserah dosennya sendiri. Apabila dosen itu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan memiliki jiwa reformasi dengan motivasinya sendiri akan melakukan inovasi buku acuan, model dan materi pembelajaran Pendidikan Kewiraan/PKN. Akan tetapi, ditemukan pula dosen doesn yang hanya menggunakan hasil pelatihan atau pendidikan Ketahanan nasional yang diperoleh dari Lemhannas maupun S2 nya, sehingga inovasi yang berarti tidak banyak dilakukan.

6. Evaluasi terhadap dosen dan materi Pendidikan Kewiraan/PKN diserahkan sepenuhnya oleh Kopertis ke PTS yang bersangkutan. Koordinasi dan evaluasi oleh kopertis hanya menyangkut urusan sejauh mana PTS melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara umum. Jadi tidak ada koordinasi khusus Pendidikan Kewiraan/PKN. Pada saat reformasi ini, Kopertis kemudian malah mempertanyakan eksistensi mereka serta tugas dan fungsinya yang telah terdesentralisasi. Disamping tidak ada koordinasi oleh Kopertis. Di beberapa perguruan tinggi tidak ada kelompok atau koordinator matakuliah Pendidikan Kewiraan/PKN. Universitas hanya mengkoordinasi secara umum pelaksanaan dan evaluasi akademik. Masalah substansi matakuliah, dosen, dan hal-hal teknis lainnya diserahkan sepenuhnya kepada fakultas atau ke MKDU Universitas kalau mereka memilikinya bahkan ada yang diserahkan ke dosennya secara langsung.

C. SOSIALISASI DAN REALISASI

1. Sosialisasi di tingkat kelembagaan

Pendidikan Kewarganegaraan secara kelembagaan ditangani Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi dengan SK Nomor 268/Dikti/Dep/2000. Pokja ini terdiri dari tiga

instansi, yaitu; Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Pertahanan (Dephan), dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tugas dari Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pendidikan Kewargaan pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasi kegiatan pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi,
- b. Mengadakan evaluasi dan rapat koordinasi dalam rangka pemantapan hasil Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Menghimpun rekomendasi akhir sebagai masukan bagi Dirjen Pendidikan Tinggi,
- d. Kelompok kerja bertanggungjawab pada Direktur Pembinaan Sarana Akademik.

Secara koordinatif, masing-masing institusi mempunyai tugas dalam sosialisasi. Departemen Hankam bertanggungjawab mengkoordinasi dosen yang telah di training oleh Lemhanas dan melakukan sosialisasi kepada setiap Komando Militer (Kodam) yang ada di setiap daerah, termasuk perguruan tinggi yang berada di bawah Departemen Pertahanan. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) memfasilitasi tempat pelatihan dan melakukan sosialisasi kepada dosen yang akan memangku mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan Depdiknas melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi yang berada dibawah kewenangannya. Pendidikan Kewarganegaraan yang diadakan Lemhanas terbuka bagi setiap dosen perguruan tinggi di Indonesia dengan syarat melakukan pendaftaran dan diseleksi melalui dalam tiga tahap, yaitu: tes tertulis, wawancara, psikotes.

Pokja sudah menerbitkan buku ajar mengenai Pendidikan Kewarganegaraan. Namun belum sampai pada mengevaluasi sejauh mana

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan sejak dikeluarkan SK Nomor 267 tahun 2000. Bakhtiar Lutfi (wakil ketua Pokja dan Ketua Pokja Pendidikan Kewarganegara di Lemhanas) mengatakan bahwa pertemuan Pokja yang diadakan selama ini, baru membicarakan masukan terhadap materi buku Pendidikan Kewarganegaraan. Masukan dan krtitikan bahan atau materi buku sudah banyak, antara lain berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti Jakarta, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dari masukan ini diharapkan mampu menyempurnakan isi buku.

Dalam penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan, ketiga institusi pemerintah yang berada di bawah Pokja melakukan koordinasi dalam memformat materi buku. Hankam dan Lemhanas menggodok materi yang berkaitan dengan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional. Sedangkan materi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Otonomi Daerah digodok oleh Depdiknas dan pakar yang sesuai dengan kompetensinya

2. Sosialisasi di Tingkat PTM

Perubahan mata kuliah Pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan belum tersosialisasikan secara merata di berbagai perguruan tinggi. Ada PTM yang sudah mensosialisasikan dan ada yang belum. Bagi PTM yang sudah mensosialisasikan, tidak semua fakultas mensosialisikannya. Sampai saat ini hanya kalangan tertentu saja seperti dosen kewiraan yang juga aktivis di organisasi sosial keagamaan yang sudah mengetahui perubahan itu, akan tetapi wujud perubahannyapun juga belum menyangkut esensi nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu beberapa Kopertis merasa sudah mensosialisasikan Surat Keputusan itu sejak semester pertama tahun ajaran 2001/2002. Tapi evaluasi

pelaksanaannya belum dilakukan. Pada prinsipnya diserahkan baik pelaksanaan maupun evaluasinya diserahkan sepenuhnya pada masing-masing PTS.

Bentuk tindak lanjut Surat Keputusan tersebut ada yang berdasar inisiatif pimpinan dalam hal ini Pembantu Rektor diteruskan ke koordinator MKDU/MKPK sampai ke dosen, atau langsung ke dosen. Bentuk tindak lanjut lain adalah berdasar inisiatif dosen sendiri, bentuk ini terjadi karena struktur perguruan tinggi tersebut tidak menyediakan koordinator MKPK. Sementara bagi PTM yang tidak mensosialisasikan ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, pimpinan belum tahu, atau lupa dengan adanya surat tersebut, dan kedua, pimpinan sudah tahu tetapi belum ditindaklanjuti. Faktor kedua terjadi disebabkan ketidakmampuan PTM untuk menindaklanjuti SK tersebut disebabkan untuk mengimplementasikannya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Diantaranya adalah untuk peningkatan kemampuan dosen, serta penyediaan sarana dan prasarana.

3. Respon pimpinan PTM

Terdapat perbedaan respon terhadap SK Dirjen Dikti No. 267 tahun 2000. Ada Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sudah mensosialisasikannya kemudian menindaklanjutinya dalam program kuliah. Salah satu pimpinan PTM menindaklanjuti dengan mengeluarkan edaran untuk menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila tidak lama setelah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No. 267 Tahun 2000. Lokakarya dimaksudkan untuk membahas dan menyatukan visi, misi, isi, metode, dan model evaluasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Lokakarya Kurikulum diikuti oleh Pembantu Rektor I, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Koordinator Bagian Al Islam dan Mata

Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), Pembantu Dekan I semua fakultas, serta seluruh dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil lokakarya yang diawali dengan analisis SWOT, menghasilkan dua alternatif pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan PKN. Hal ini terkait dengan gagasan pimpinan universitas untuk menggabungkan keduanya dalam satu semester. Alternatif pertama adalah kedua mata kuliah berjalan seperti adanya, dua mata kuliah dua semester. Alternatif kedua adalah dua mata kuliah satu semester. Lokakarya akhirnya menghasilkan dua silabus pengajaran, dari dua mata kuliah tersebut.

Respon lainnya adalah PTM mengganti isi matakuliah kewiraan dengan PKN sesuai isi SK tersebut namun nama matakuliahnya masih tetap menggunakan nama Pendidikan Kewiraan. Hal ini disebabkan ketidak tahuan dan ketidaksiapan PTM untuk meresponnya.

4. Realisasi

Pelaksanaan Pendidikan Kewiraan maupun Kewarganegaraan bervariasi dari PTM satu dengan PTM yang lain. Pada PTM yang sudah melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan, proses ini dimulai dari disposisi pimpinan PTM kepada Koordinator MKPK agar SK Dirjen Dikti ditindaklanjuti dengan Lokakarya Kurikulum. Lokakarya inilah yang selanjutnya membahas berbagai hal agar kemauan pemerintah tersebut dapat berjalan. Lokakarya yang dilakukan menghasilkan silabus pengajaran, pembagian tugas dosen, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menyampaikan mata kuliah baru ini. Kasus Universitas Muhammadiyah Malang berbeda dengan PTM lain, di mana Mata Kuliah Pancasila dan PKN digabungkan dalam satu semester kuliah. Dengan demikian dua mata kuliah yang SKS-nya empat diajarkan menjadi satu. Pada PTM lain, beban pengajaran PKN masih tetap 2 SKS.

Dosen yang mengajar Kewiraan/PKN di PTM seluruhnya lulusan Lemhanas dan S2 Tannas. Dosen-dosen tersebut ada yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, dan ada yang berasal dari PTM sendiri maupun ada dosen Luar Biasa dari militer. Materi yang diberikan dalam kuliah Pendidikan Kewiraan/PKN antara dosen satu ke dosen yang lain tidak sama. Ada yang masih memberikan wawasan dengan penekanan pada materi kewiraan lama, ada yang sudah menambah tekanan pada materi yang sudah dirumuskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, seperti: HAM dan Demokrasi. Banyak dosen Kewiraan yang sudah mempunyai kesadaran untuk berinovasi dan telah memodifikasi materi Kewiraan. Materi yang digunakan di PTM pun cukup beragam. Bagi PTM yang sudah mensosialisasikan PKN mereka menggunakan buku yang diterbitkan oleh Lemhanas tahun 2001 dengan tambahan suplemen materi. Bagi yang belum mensosialisasikan mereka menggunakan buku ajar yang lama yang juga diterbitkan oleh Lemhanas. Sementara ada PTM yang sudah menggunakan buku Lemhanas yang baru dan juga modul tambahan walaupun mereka belum mengganti nama matakuliah. Bahan ajar yang selama ini digunakan masih sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya terutama bagi PTM di luar Jawa

Hampir semua PTM yang diteliti metode pengajarannya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan model klasikal dan dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar.

D. KELAYAKAN

Secara prinsip semua responden menyetujui dan mendukung gagasan pengembangan CE di PTM, dengan alasan nilai-nilai CE penting bagi masa depan mahasiswa sebagai calon pemimpin, penting sebagai sarana sosialisasi kesadaran bermasyarakat dan bernegara serta penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai CE juga berperan dalam menumbuhkan sikap

kritis mahasiswa serta merubah perilaku, moralitas dan budi pekerti kearah yang lebih baik. Dari perspektif desentralisasi kuliah CE memberi peluang untuk penanaman nilai lokal yang diartikan sebagai penanaman kekhasan lokal, agama/kemuhammadiyah, maupun lokal dalam arti program studi. Sementara pihak yang keberatan mendasarkan pandangannya pada terlalu banyaknya mata kuliah yang sejenis padahal sesungguhnya nilai-nilai tersebut dapat digabung dengan mata kuliah lain.

Bagi yang sepakat menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai kewargaan jelas masih sangat perlu dilakukan di perguruan tinggi. Ada beberapa pendapat dikalangan pimpinan dalam pengembangan *civic education* di PTM

1. Dengan adanya *civic education* mahasiswa akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, untuk kepentingan negara dan bangsa dalam rangka membangun kehidupan bersama yang aman dan damai. Juga menumbuhkan cara berfikir, sikap dan perilaku dari sektoral ke komprehensif integral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pendidikan Kewarganegaran harus diberikan kepada mahasiswa karena apa yang sudah diberikan dari SD sampai SMU belum cukup. Salah satu hal yang mendasari adalah mahasiswa lebih rasional dan lebih dewasa sehingga dapat berdampak lebih baik dibandingkan ketika mereka mendapatkannya di sekolah.
3. Persoalan di Indonesia seperti krisis moral, krisis sosial dan kecenderungan untuk disintegrasi serta munculnya konflik harus diantisipasi diantaranya dengan pendidikan PKN tersebut.
4. Dengan adanya *civic education* nilai-nilai demokrasi, reformasi, modernitas, transparansi, akuntabilitas, good governance, tertib sosial, kesadaran berbangsa dan bernegara, kebebasan, keadilan, hak-hak asasi

manusia, otonomi daerah, dapat secara eksplisit dicantumkan dalam literatur dan diinternalisasikan lewat matakuliah.

5. Disamping nilai-nilai di atas dengan adanya *civic education* nilai lain seperti kebersamaan, komunikasi, dan sikap cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat serta konsep-konsep seperti hakekat pendirian negara, ideologi, konstitusi, sistem pemerintahan, proses berbangsa, dan hak dan kewajiban warga negara dapat ditanamkan.

Dari penelitian disepakati bahwa sosialisasi Pendidikan Kewarganegaraan tidak harus melalui pengajaran saja. Mereka mendukung apabila sosialisasi Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model lain seperti melalui kegiatan mahasiswa ataupun Pengabdian Masyarakat.

Namun, pengembangan CE melalui pengajaran masih dipandang sebagai jalur utama yang harus diterapkan disetiap PTM. Dijalur pengembangan melalui pengajaran ini diperlukan peningkatan jumlah dosen, peningkatan kualitas dosen maupun penerapan metode yang lebih baik terutama pengelolaan kelas. Mengenai metode, secara umum metode yang tepat adalah metode gabungan. Artinya harus ada porsi yang tepat untuk ceramah, tanya jawab maupun diskusi tentang sesuatu topik atau kasus. Metode yang digunakan sebaiknya variatif tidak hanya satu saja karena setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Disamping itu metode yang tepat adalah dengan kelas kecil kurang lebih 60 mahasiswa, yang dibagi menjadi beberapa kelompok lagi untuk diskusi dan presentasi (membuat paper dan didiskusikan). Dapat pula dengan studi kasus. Ada usulan lain untuk menggunakan metode TKN (Teknik Klarifikasi Nilai) yang sudah dirumuskan dalam buku yang disusun oleh Kosasi Jairo serta metode Sintetik Disiplin. Untuk metode pengajarannya perlu diperkaya dengan model yang tidak saja bersifat di kelas, tapi perlu adanya bentuk lain dalam bentuk kuliah

lapangan. Metode harus disesuaikan dengan pokok bahasan yang sedang diajarkan, misalnya: ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas terstruktur, *problem solving*, studi kasus.

Semua responden menyatakan bahwa cara evaluasi yang telah dilakukan (nilai yang diambil dari tugas, UTS, UAS) merupakan cara yang masih relevan untuk model pengajaran. Akan tetapi cara evaluasi lain yang juga tepat adalah dengan melihat perubahan perilaku. Perubahan perilaku dapat diukur antara lain misalnya melihat mahasiswa dari perilaku brutal menjadi lebih sopan, tidak sholat menjadi sholat, ataupun dari tingkah laku sehari-hari dikelas/kampus (misnya: hormat, menghargai teman, guru dan karyawan), serta mengecek perilaku sehari-hari di kos, di masyarakat, dan pendekatan pribadi. Namun hal ini akan sulit dipantau satu persatu jika jumlah siswanya cukup banyak (1 kelas 100-200 di UM Kupang) sementara menilai perilaku selama 2 jam saja tidak cukup. Mekanisme evaluasi yang ideal adalah memberikan lembaran kepada mahasiswa untuk meminta pendapatnya tentang materi, metode dan kompetensi dari dosen yang mengajarkan Pendidikan Kewiraan. Model evaluasi CE adalah evaluasi dari awal sampai akhir kuliah dengan pembobotan yang adil. Seluruh proses pendidikan dikelas dievaluasi. Kehadiran, ketertiban, disiplin, perilaku, dievaluasi disamping evaluasi tertulis yang berisi *case study*. Semua proses evaluasi didasarkan atas learning contract yang disepakati dalam kuliah. Bentuk evaluasi lain yang diusulkan, penilaian berdasarkan kemampuan kognitif melalui hasil ujian mid semester dan ujian semester, penugasan membuat makalah studi kasus, serta keaktifan di kelas, juga bobot aktifitas yang diikuti mahasiswa di luar kelas. Hasilnya adalah adanya perubahan perilaku pada mahasiswa.

PTM perlu membentuk konsorsium MKDU yang mengelola materi dan GBPP MKDU, agar tidak terjadi tumpang tindih materi yang diajarkan dan dapat lebih sistematis. Disamping itu Pendidikan Kewarganegaraan diusulkan

untuk diletakkan di semester tengah atau akhir sehingga tidak mengganggu spesialisasi. Kemudian ada beberapa usulan bahwa materi sejenis (Pancasila dan Agama) perlu digabung agar tidak tumpang tindih.

Sementara pengembangan CE melalui kegiatan Mahasiswa dapat dilakukan diantaranya dengan kegiatan berupa temu tokoh yang memiliki komitmen kebangsaan sehingga mampu menggugah semangat mahasiswa untuk terus berjuang memerangi keterbelakangan bangsa Indonesia. Dalam pendidikan kewarganegaraan masa yang lalu tersirat materi demokrasi dan politik, sekarang harus dieksplisitkan. Dinyatakan bahwa perlu ada kerjasama antara bidang akademik dengan bidang kemahasiswaan serta dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan mahasiswa, guna menentukan bentuk kegiatan mahasiswa yang bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan. Disepakati pula bahwa pengembangan CE melalui kegiatan kemahasiswaan, terbuka bagi topik-topik yang sangat dekat dengan wacana yang berkembang pada dunia mahasiswa, demokrasi dan HAM, misalnya. Aktivitas yang dapat jadi alternatif adalah diskusi, pelatihan, seminar dan talkshow. Untuk pengembangan CE melalui kegiatan kemahasiswaan perlu ada kerjasama antara bidang akademik dengan bidang kemahasiswaan serta dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan mahasiswa, guna menentukan bentuk kegiatan yang bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan.

Peluang internalisasi nilai Pendidikan Kewargaan pada kegiatan Pengabdian cukup besar karena penanaman nilai yang lebih aplikatif tidak hanya lewat pengajaran saja tetapi lewat media yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Mahasiswa sangat dimungkinkan untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai CE melalui KKN atau melalui bentuk pengabdian masyarakat yang lain. Pengendalian secara struktural sebaiknya di bawah koordinasi Pembantu Rektor III beserta, PD III dan LPM. Hanya saja mereka menyatakan kalau melalui pengabdian masyarakat perlu dana dan

persiapan yang lebih. Karena mahasiswa perlu dibekali/ditraining dulu sebelum diterjunkan ke lapangan, baik training mengenai materi maupun metode yang dapat digunakan untuk sosialisasi pendidikan nilai tersebut.

Untuk merealisasikan program ini di tingkat LPM sebaiknya perlu dirumuskan materi yang tepat mengenai kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, materi Pendidikan Kewargaan dalam kaitannya dengan filsafat Kemuhammadiyah, bentuk-bentuk proyek pengabdian masyarakat. Perlu desain yang lebih teliti untuk mengembangkan semua *civic values*.

Ide internalisasi Pendidikan Kewarganegaraan lewat pengabdian masyarakat melalui bentuk KKN mandiri atau magang sesuai dengan disiplin ilmu sebaiknya perlu diadakan pilot project dengan melakukan Uji coba untuk membuat KKN yang punya misi khusus penanaman Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengambil dua lokasi cabang Muhammadiyah yang memiliki karakteristik khusus untuk dijadikan sebagai tempat uji coba, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala bagi LPM dalam realisasikan program pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ini mengingat kondisi masing-masing LPM di PTM berbeda. Namun sebagian mengalami permasalahan yang sama, yaitu masalah struktural seperti adanya sentralisasi kewenangan sehingga tidak ada peluang internalisasi nilai Pendidikan Kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. LPM tidak memiliki banyak personil, otoritas dan anggaran yang terbatas. Hambatan yang lain dihadapi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat di adalah sangat terkait dengan konteks perubahan masyarakat yang sedang berubah kearah masyarakat madani, masih menguatnya politisasi masyarakat di tingkat bawah (*grassroot*) .

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Perubahan situasi iklim sosial-politik, sebagai kelanjutan dari proses reformasi, merupakan pendukung utama untuk perubahan tata nilai yang hendak dikembangkan melalui CE. Keinginan untuk mengembangkan demokrasi, masyarakat sipil, desentralisasi, serta nilai-nilai baru lainnya mendapat peluang besar dari iklim sosial-politik yang sedang berubah.
- b. Pandangan positif berbagai komponen di PTM tentang CE sebagai pendidikan nilai. Pimpinan, dosen, mahasiswa dan pengamat sebagian besar setuju pengembangan CE ini.
- c. Keinginan untuk menggabungkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan PKN. Keinginan tersebut muncul karena sebagian perguruan tinggi maupun program studi ingin mengurangi beban mata kuliah yang “dianggap tidak penting” dan memfokuskan pada mata kuliah spesifik untuk program studinya. Oleh karena itu CE diharapkan dapat menjadi alternatif baru bagi penggabungan dua mata kuliah tersebut.
- d. Adanya peluang untuk memasukkan nilai-nilai lokal tertentu pada kuliah CE. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu otonomi, membuat civitas akademika bersemangat untuk memasukkan local values pada mata kuliah tertentu, pada kuliah CE peluang itu dapat diterima.

2. Faktor Penghambat

- a. Belum ada kesepakatan tentang materi CE, yaitu materi yang dapat digolongkan sebagai materi inti, materi tambahan, maupun materi yang mengandung local values. Diperlukan pertemuan yang melibatkan banyak komponen PTM dalam rangka penyusunan materi CE.

- b. Belum ada dosen yang pernah mengajarkan CE yang berbeda dengan Pendidikan Kewiraan yang lama, sehingga membutuhkan pelatihan, pemahaman dan kesadaran baru akan CE.
- c. Jumlah dosen yang sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi pendidikan yang ideal, di mana rasio dosen dan mahasiswa kecil. Pemenuhan dosen ini berpeluang membebani PTM yang posisi finansialnya tidak terlalu sehat.
- d. Belum adanya instrumen evaluasi pendidikan nilai yang mapan, sehingga penilaian keberhasilan pendidikannya belum standar.